

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Effendy, M. (2019). *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fuady, M. (2013). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Kencana Prenadamedia Group.
- Gunawan, I. (2019). *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik*. Sinar Grafika.
- Hasim, H. (2019). *Filsafat Hukum*. CV. Khaaffah Learning Center.
- K. Bertens. (2007). *Etika* (8th ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- Marzuki, S. (2015). *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- Mulyana, D. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (5th ed.). Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, B. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. CV. Citra Wira Karya Kota Parepare.
- Nuh, M. (2011). *Etika Profesi Hukum*. Pustaka Setia.
- Prodjodikoro, W. (2012). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (3rd ed., Vol. 4). PT. Refika Aditama.
- Prodjodikoro, W. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Vol. 6). PT. Refika Aditama.
- Qamar, N. (2017). *Etika Profesi Hukum (Empat Pilar Hukum)*. CV. Social Politic Genius.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. (2009). *Moralitas Profesi Hukum* (Vol. 2). PT. Refika Aditama.
- Sujamto. (1983). *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*. Ghalia Indonesia.
- Sumaryono, E. (2003). *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum* (Ke 6). Kanisius.
- Surachman, R. (2015). *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara* (Vol. 1). Sinar Grafika.

- Sutrisno. (2016). *Etika Profesi Hukum*. C.V Andi.
- Thamrin, A. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. CV. Kaaffah Learning Center.
- Viswandro. (2015). *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Medpress Digital.
- Yuwono, I. D. (2011). *Memahami berbagai etika profesi dan pekerjaan*. MediaPressindo.

PERUNDANG UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa
- Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-015/A/JA/07/2013 Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-022/A/JA/03/2011 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan

Sumber Lainnya

- Achmad Asfi Burhanudin. (2018). Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.25>
- Akhmaddhian, S., & Prapanca, W. G. (2019). Penegakan Hukum terhadap Jaksa yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 10(01), 60–68.
- Alamsyah, B. (2013). Penegakan Hukum dan Keadilan di Indonesia Antara Harapan dan Kenyataan. *Jurnal Legalitas*, 4(1), 39.
- Aldi, G. (2023). Moral, Etika Dan Kode Profesi Jaksa Sebagai Penegak Hukum. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 1, 9.
- Anita Sinaga, N. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>
- Aprilia, D. (2020). Optimalisasi Pengawasan Komisi Kejaksaan Dalam Mengawasi Pelanggaran Kode Etik Kasus Korupsi Pada Jaksa. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(4).

- Arfandi, S. L. (2020). *Analisis Kritis Terhadap Kode Etik Jaksa*. Researchgate. Researchgate.net
- Ariyanti, V. (1970). Kebebasan Pers Dalam Perspektif Peradilan Pidana. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.24090/komunika.v4i1.134>
- Barizqi, G. C. (2018). *Peran pengawasan komisi kejaksanaan terhadap penegakan kode etik jaksa*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42940>
- Candra, S. (2013). Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(2). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.76>
- Detik. (2020). *Jaksa Ester Divonis 1 Tahun, Jaksa Dara Bebas*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-1252904/jaksa-ester-divonis-1-tahun-jaksa-dara-bebas>
- Fadillah, S. (2021). Penguatan Rekomendasi Komisi Kejaksanaan dalam Pengawasan Pelanggaran Etik Jaksa. *Legislatif*, 4(2), 182.
- Fahmi, W. (2020). *Dihukum Satu Tahun, Jaksa Ester Hanya Dianggap Lalai*. Tempo. <https://metro.tempo.co/read/211514/dihukum-satu-tahun-jaksa-ester-hanya-dianggap-lalai>
- Hoesein, Z. A. (2013). Lembaga Peradilan dalam Perspektif Pembaruan Hukum. *Jurnal Media Hukum*, 20(1).
- Hutagalung, S. M. (2017). Penegakan Hukum di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum? *Social Polites*. <https://doi.org/10.33541/sp.v1i1.465>
- Ifrani, I. (2018). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 9(3). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1047>
- Indrawan Ariadi, P. (2015). Kewenangan Komisi Kejaksanaan Terhadap Tugasnya Untuk Melakukan Pengawasan Khususnya Kepada Kewenangan Penuntut Umum. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 4(4). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2015.v04.i04.p03>
- Irsan, K. (2016). *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Gramata Publishing.
- J Danang, W. (2013). Reproduksi Korupsi: Studi Kasus Korupsi Jaksa Tri Gunawan. *Jurnal MMH*.
- Jainah, O. Z. (2012). Penegakan Hukum dalam Masyarakat. *Journal of Rural and Development*, 3, 168.

- Kelen, Y. (2018). *Jaksa Senior di Kejati NTT Dijemput Paksa*. Berita Satu. <https://www.beritasatu.com/nasional/340401/jaksa-senior-di-kejati-ntt-dijemput-paksa>
- Kenedi, J. (2014). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal El-Afkar*, 3(1), 79.
- Khaidir, K. (2020). Analisis Yuridis Pembalikan Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi. *Rio Law Jurnal*, 1(1). <https://doi.org/10.36355/v1i1.327>
- Kompas. (2023). *JPU Cekar Teddy Minahasa soal Perintah Ganti Sabu dengan Bubuk Tawas!* Kompas tv Lampung. <https://www.kompas.tv/regional/383705/jpu-cekar-teddy-minahasa-soal-perintah-ganti-sabu-dengan-bubuk-tawas>
- LBH. (2022). Catatan-catatan Kritis Terhadap Revisi UU Kejaksaan dan Upaya Reformasi Kejaksaan RI. *Lembaga Bantuan Hukum Jakarta*, 12.
- Muhammad, B. (2013). Banjir Ketentuan Pidana dalam RUU Kejaksaan. *Fiat Justitia*, 1.
- Naibaho, R. (2023). *Sidang Kode Etik Irjen Teddy Minahasa Selesai Usai 13 Jam*. Detik. <https://news.detik.com/berita/d-6747958/sidang-kode-etik-irjen-teddy-minahasa-selesai-usai-13-jam>
- Nurkasihani, I. (2018). *Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat*. JDIIH. Jdih.tanahlautkab.go.id
- Pelle, L. V. (2012). Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Crime*, 1(3).
- PRAKOSO, A. (2015). *Etika profesi hukum : telaah historis, filosofis, dan teoritis kode etik notaris, advokat, polisi, jaksa, dan hakim*. Laksbang Justitia.
- Rakatama, A. (2008). *Peran Komisi Kejaksaan Sebagai Perwujudan Partisipasi Publik Dalam Rangka Pengawasan Lembaga Kejaksaan*. Universitas Diponegoro.
- Ramadhan, C. R. (2013). Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Komisi Kejaksaan. *Media Hukum Dan Peradilan: Teropong*, 1.
- Rfq. (2020). *Jaksa Terpidana Ekstasi akan Diberhentikan Secara Tidak Hormat*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-ester-lt4b53dc9feb85e/?page=1>
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIs*, 10(1).

- Saputra, A. (2018). *Gelapkan Barang Sitaan, Jaksa Djami Dihukum 15 Tahun Penjara*. Detik. <https://news.detik.com/berita/d-3410641/gelapkan-barang-sitaan-jaksa-djami-dihukum-15-tahun-penjara>
- Saputra, R. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Jaksa. *Jurnal Hukum Adigama*.
- Saputro, O. W., & Priyana, P. (2021). Penegakan Kode Etik Terhadap Jaksa Yang Melakukan Korupsi. *Jurnal Kertha Semaya*, 9, 493–503. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i03.p11>
- Saubani, A. (2023). *Kronologi Sabu Diganti Tawas dan Terungkapnya Julukan 'Bos Besar' Teddy Minahasa*. Republika. <https://news.republika.co.id/berita/rqkht5409/kronologi-sabu-diganti-tawas-dan-terungkapnya-julukan-bos-besar-teddy-minahasa>
- Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3).
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Soemarno. (2018). *Struktur Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dan Mekanisme Kerja Dalam Meningkatkan Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*.
- Sudjono, P. (2023). *Irjen Teddy Minahasa Dipecat. Apa Saja Kode Etik yang Dilanggar?* Krjogja. <https://www.krjogja.com/peristiwa/read/507305/irjen-teddy-minahasa-dipecat-apa-saja-kode-etik-yang-dilanggar>